

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 telah mengamatkan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dinamakan juga, bahwa “Kesehatan adalah keadaan secara sehat, baik secara fisik, mental spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Dalam konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 1948) tertulis juga, bahwa “*Health is a fundamental human right*”. Yang mengundang suatu kewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan mempertahankan yang sehat. Hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat sebagai hak asasi manusia. Kesehatan Masyarakat adalah semua upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan menggunakan serangkaian upaya yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur atau ciri-ciri Berbasis Masyarakat, Berorientasi pencegahan atau peningkatan derajat kesehatan, Dilaksanakannya secara lintas disiplin atau bekerja sama dengan sektor non-kesehatan, Adanya keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dan Terorganisir dengan baik (Achmadi, 2014).

Kesehatan Masyarakat menurut Winslow (1920) dalam Notoatmodjo adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit-penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, pengorganisasi pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan, pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya (Notoatmodjo, 2015).

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah (Permenkes RI, 2016).

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksanaan pemerintah dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada daerah melalui sekretaris daerah. Dinas kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagai urusan daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dan melakukan tugas pembantuan sesuai bidangnya. Dinas Kesehatan adalah satuan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten/Kota (Permenkes No.75 Tahun 2014).

Promosi Kesehatan merupakan bagian integral dari Pembangunan Kesehatan Nasional. Hal ini dapat dilihat bahwa Promosi Kesehatan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya (Depkes, 2004). Program Promosi Kesehatan mencakup upaya promotif dan preventif yang merupakan determinan penting dari perilaku hidup sehat masyarakat (Depkes, 2007).

Program Promosi Kesehatan dalam kegiatan Forum Kota Sehat di Kota Tangerang tahun 2019 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kota sehat melalui pemberdayaan masyarakat, melalui forum yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Tangerang. Tujuan Program Kota Sehat pada dasarnya adalah tercapainya kondisi Kota Tangerang yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan bekerja bagi seluruh masyarakat dengan terlaksananya berbagai program-program kesehatan, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktifitas dan perekonomian masyarakat di Kota

Tangerang (Bapeda, 2014). Program Kota Sehat pertama kali dikenalkan pada tahun 1984 di Toronto, Kanada oleh WHO (Duhl, 2005). Di Asia sendiri Program Kota Sehat pertama kali diperkenalkan di Bangladesh pada tahun 1999. WHO sendiri mendefinisikan Kota Sehat sebagai salah satu program yang terus dikembangkan dengan kebijakan-kebijakan publik dan menciptakan lingkungan-lingkungan fisik dan sosial yang memungkinkan orang-orang untuk saling mendukung satu sama lain dalam melaksanakan semua fungsi kehidupan dan mencapai potensi mereka secara penuh (Healthy Toronto 2000 Subcommittee, 1988 dalam Kenzer, 2000). Gerakan Kota Sehat pada dasarnya menghubungkan antara kondisi kehidupan kota dengan kesehatan. Kesehatan yang dimaksud tidak hanya berupa kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental, sosial, ekonomi, politik dan spiritual dari penduduk kota. Maka, kota membuat peraturan untuk mengembangkan strategi peningkatan kesehatan, sehingga kota memiliki potensi yang tinggi untuk memproduksi manusia yang sehat (Morse & Morse, 2019).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota perlu menyelenggarakan Kota Sehat. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kota Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah dan pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan (Menteri Dalam Negeri & Menteri Kesehatan, 2005).

Kota Sehat adalah keadaan kota yang hendak diwujudkan (derivat dari provinsi sehat) yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan sehat, mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, mampu menyediakan dan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Bila mengacu pada konsep kota sehat (*Health City*) yang dikembangkan oleh WHO bersamaan dengan hari ulang tahunnya yang bertema *Healthy Cities for Better Life*, kota sehat merupakan gerakan masyarakat yang terus menerus dan sistematis, berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan lingkungan sosial, didukung oleh

pemerintah daerah (lokal) sehingga tercapai kawasan perkotaan yang nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya yang disebut *City fit to live in* (Hadi, 2002).

Perkembangan Gerakan Kota Sehat di setiap negara berbeda, tergantung permasalahan yang dihadapi dan dipertimbangkan. Namun tiap negara memiliki kesamaan konsep tentang Kota Sehat, yaitu berasal dari keinginan dan kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan difasilitatori oleh pemerintah. Konsep Kota Sehat juga mengutamakan pendekatan proses dari target, tidak mempunyai batas waktu, dan berkembang secara dinamik, sesuai dengan sasaran yang diinginkan masyarakat yang dicapai secara bertahap (Menteri Dalam Negeri & Menteri Kesehatan, 2005).

Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Kota Sehat. Klasifikasi Kabupaten/Kota Sehat meliputi pemantapan, pembinaan dan pengembangan. Klasifikasi ditentukan berdasarkan jumlah tatanan Kota Sehat yang dipilih. Kota Sehat dilaksanakan melalui forum dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Dalam kegiatan ini tim pembina Kota Sehat yaitu diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggota dari instansi terkait, dan tim pembina tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Tujuan dibentuknya tim pembina Kota Sehat adalah untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah (Menteri Dalam Negeri & Menteri Kesehatan, 2005).

Pelaksanaan seleksi Kota Sehat dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah daerah provinsi dan instansi terkait. Hasil seleksi Kota Sehat disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Kesehatan dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan penilaian. Penilaian penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang anggotanya terdiri dari unsur Departemen Kesehatan, Departemen Dalam negeri dan Departemen Terkait sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Hasil penilaian direkomendasikan oleh Tim Penilai Pusat Kepada Menteri Kesehatan untuk dapat

dipertimbangkan sebagai Kabupaten/Kota Sehat.

Penghargaan Kota Tangerang Sehat dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, yang diberikan oleh Pemerintah pada Bulan November dalam rangka peringatan hari kesehatan Nasional. Pemerintah provinsi melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kota yang menyelenggarakan Kota Sehat Pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Bertujuan untuk mendorong tercapainya standar optimal di wilayah provinsi tersebut sesuai dengan tatanan Kota Sehat.

Tercapainya kondisi Kota untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana, produktivitas dan perekonomian masyarakat. Berikut ini sasaran dalam kegiatan Kabupaten/Kota Sehat :

1. Terlaksananya Program Kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum yang disepakati masyarakat.
2. Terbentuknya Forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik.
3. Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya serta perilaku pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kabupaten/Kota tersebut secara mandiri.
4. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Seksi Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang memiliki kegiatan Forum Kota Tangerang Sehat yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi atau lingkungan yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui gambaran kegiatan Kota Tangerang Sehat di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Oleh karena itu penulis membuat laporan magang dengan judul “Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Tangerang Sehat di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2019”.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pelaksanaan kegiatan Forum Kota Tangerang Sehat di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2019.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2019.
2. Mengetahui gambaran seksi Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2019.
3. Mengetahui gambaran *Input* meliputi SDM, Anggaran, Sarana dan Prasarana, Metode (SOP) dari pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Tangerang Sehat di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2019.
4. Mengetahui gambaran Proses dari pelaksanaan Forum Kota Tangerang Sehat di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2019.
5. Mengetahui gambaran *Output* dari pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Tangerang Sehat di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2019.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Bagi Penulis

1. Mengetahui gambaran pelaksanaan kegiatan Forum Kota Tangerang Sehat yang dilakukan oleh Seksi Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2019.
2. Memperoleh pengalaman praktis dan mengenal dunia kerja.
3. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas pribadi.

4. Menanamkan dan menciptakan semangat kerja sejak dini.
5. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktik di lapangan.

1.3.2 Manfaat Bagi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan

1. Sebagai pengetahuan tambahan untuk memperdalam wawasan mahasiswa kesehatan.
2. Terbinanya hubungan yang baik antara Fakultas dengan tempat magang.

1.3.3 Manfaat Bagi Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Kegiatan magang ini diharapkan bisa menjalin hubungan kemitraan dengan fakultas, baik dalam penelitian maupun pengembangan, selain itu diharapkan dapat memberikan solusi permasalahan yang ada serta dapat menjadikan masukan dan saran untuk peningkatan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang.